KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (O21) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 3480612

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI DAN ASISTEN DEPUTI KOORDINASI KERJA SAMA MULTILATERAL
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Nomor : 1 /Pansel-JPT-Polhukam/9/2022

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. JPT yang lowong adalah :
   a. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan
   b. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral.
2. Persyaratan Umum :
   1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   2) Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 November 2022;
   3) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk.I (IV/b) dan pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
   4) Sekurang-kurangnya telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III atau yang disetarakan, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II atau yang disetarakan;
   5) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
   6) Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   7) Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang;
   8) Memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;
   9) Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1), diutamakan Magister/Pascasarjana (S-2);
   10) Memiliki bukti laporan SPT Tahun Terakhir;
   11) Melampirkan bukti menyampaikan laporan LHKPN/LHKASN;

12) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
14) Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Persyaratan Khusus

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kemenko Polhukam untuk Jabatan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral adalah mengutamakan standar kompetensi bidang yang memiliki pengalaman dan penugasan dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait tentang isu di bidang kerja sama multilateral serta untuk Jabatan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah mengutamakan standar kompetensi bidang yang memiliki pengalaman dan penugasan dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi.

3. 1. STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	**1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri** **2. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral**
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	**Eselon II.a**
3.	Unit Kerja	:	**1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri** **2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri**

No	Kompetensi	Level
1	2	3
1.	Integritas	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi.
2.	Kerja Sama	Membangun komitmen tim sinergi.
3.	Komunikasi	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong

		kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4.	Orientasi pada hasil	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.
5.	Pelayanan Publik	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.
6.	Pengembangan diri dan orang lain	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran.
7.	Mengelola perubahan	Memimpin perubahan pada unit kerja.
8.	Pengambilan Keputusan (PK)	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan mitigasi risiko.

3.2. STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

1.	Nama Jabatan	:	**1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri** **2. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral**
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	**Eselon II.a**
3.	Unit Kerja	:	**1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri** **2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri**
No	**Kompetensi**	**Level**	
1	2	3	
1.	Perekat Bangsa	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi (M.4)	

4. Waktu dan Tata Cara Pendaftaran
   a. Pendaftaran dimulai tanggal 12 s.d. 16 September 2022;
   b. Surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta dokumen seperti:
      1) Daftar Riwayat Hidup (sesuai dengan format terlampir);

2) Formulir Rekam Jejak (Sesuai dengan format terlampir)
3) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
4) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
5) Salinan sah penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;
6) Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (tautan contoh Surat Persetujuan terlampir);
7) Salinan sah ijazah yang dipersyaratkan;
8) Bukti Penyerahan SPT Tahun terakhir;
9) Bukti penyampaian LHKPN/LHKASN;
10) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
11) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;
12) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
13) Pas Foto dengan background merah;
14) Salinan Sah Tanda Tamat Diklat Teknis/Diklat Fungsional;
15) Dokumen pendukung lainnya (Jika ada).

c. Seluruh dokumen dilampirkan dalam bentuk **format pdf** kecuali pada angka 13 menggunakan format JPG/JPEG dan dilakukan pendaftaran melalui website **https://sipenjapti.id** dan dokumen dikirimkan melalui alamat email **polhukam.kepeg@gmail.com**.

d. Tahapan seleksi sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman dan Penerimaan berkas lamaran seleksi terbuka pengisian JPT Pratama	12 – 16 September 2022
2	Pengolahan data dan verifikasi berkas kandidat	19 – 20 September 2022
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	21 September 2022
4	Pemanggilan para kandidat yang lulus administrasi melalui *video conference*	23 September 2022
5	**Tes Kompetensi Bidang (Akademisi) (*online*)**	
	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral	26 September 2022
	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri2	26 September 2022
6	**Tes Assesment (*online*)**	
	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral	27 September 2022
	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	27 September 2022
7	**Penelusuran Rekam jejak, Paparan Visi dan Misi serta Wawancara (pendalaman hasil Kompetensi Bidang) melalui *video conference***	
	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral	28 September 2022
	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	29 September 2022

Apabila ada perubahan jadwal akan diumumkan lebih lanjut melalui situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, **www.polkam.go.id**

5. Ketentuan Lain – lain
   a. Pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Panitia Seleksi atau dengan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kemenko Polhukam;
   b. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kemenko Polhukam tidak dipungut biaya apapun;
   c. Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;
   d. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
   e. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar untuk mengikuti proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kemenko Polhukam.

Jakarta, 6 September 2022
Ketua Panitia Seleksi,

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Teguh Pudjo Rumekso